

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Kondisi dan situasi yang semakin berkembang di dunia saat ini terus mengalami banyak perubahan serta banyak menimbulkan permasalahan. Baik dari persoalan sosial, politik, ekonomi, maupun kebudayaan dari masing-masing negara menginginkan suatu sikap saling ketergantungan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul. Ketika kita berbicara masalah itu, maka kita telah berbicara tentang masalah sistem politik global dan ketika kegiatan politik yang meningkat dalam sistem global serta berpotensi menyebabkan sebuah masalah, maka diperlukan sebuah wadah untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, sebuah organisasi internasional dibutuhkan sebagai salah satu sarana dalam penyelesaian permasalahan tersebut.

Persoalan *human security* yang terjadi pasca revolusi Mesir menyebabkan banyak dampak negatif yang terjadi di Mesir. Penggulingan Hosni Mubarak yang menghasilkan revolusi dan pemilihan presiden pertama setelah revolusi merupakan suatu permasalahan yang sangat besar yang melanda rakyat Mesir. Terpilihnya Mursi sebagai presiden pertama pasca

revolusi dan dikeluarkannya dekrit baru oleh presiden Mursi yang berisi tentang semua keputusan dan ketentuan hukum yang dikeluarkan tidak dapat dibatalkan. Dekrit tersebut banyak diperdebatkan oleh beberapa pihak, sehingga muncullah sebuah konflik antar kelompok yang pro Mursi dan kelompok yang menentang Mursi. Pertentangan tersebut mengakibatkan adanya bentrokan antar rakyat Mesir dan tentara, demonstrasi tersebut banyak memakan korban. Rakyat mesir mengalami banyak kerugian mulai dari kehilangan sanak sodara sampai kehilangan tempat tinggal. Hal ini menjadi perhatian dunia dan telah menjadi topik dunia yang mengharapkan sebuah penyaluran dan penyelesaian bersama dari PBB sebagai organisasi internasional yang sesuai dengan tujuannya, yaitu mengusahakan kerjasama internasional dalam persoalan baik ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan untuk meningkatkan serta mendorong penghargaan terhadap hak asasi manusia dan dasar kemerdekaan tanpa perbedaan atas ras, bahasa, agama, dan perdamaian dunia serta keamanan internasional.¹

Penjelasan yang ditulis di atas merupakan alasan dipilihnya judul “*Peran PBB dalam Menangani Human Security Pasca Revolusi Mesir Tahun 2011*”. Mengingat PBB sebagai organisasi internasional yang bersifat umum, dimana hampir semua negara di dunia menjadi anggotanya dengan struktur politik, ekonomi, dan sosial yang berbeda merupakan wadah yang tepat untuk

¹ Husni Amriyanto, Diktat Mata Kuliah Organisasi Internasional, FISIPOL UMY, hal.14

menyalurkan dan membantu penyelesaian atas permasalahan *human security* di Mesir pasca revolusi.²

B. Latar Belakang Masalah

Konsep keamanan nasional (negara) mempunyai sejarah yang panjang. Definisi keamanan nasional diartikan sebagai upaya untuk mempertahankan integritas teritori suatu negara dan kebebasan untuk menentukan pemerintahan. Dalam perkembangan dan semakin kompleksnya hubungan antara negara serta beragamnya ancaman yang dihadapi oleh negara-negara di dunia, maka rumusan dan praktek penyelenggaraan keamanan cenderung dilakukan secara bersamaan (*collective security*) menjadi acuan negara-negara di dunia. Pada saat ini konsep keamanan nasional mulai memasuki aspek-aspek sosial yang berkaitan dengan kehidupan manusia yang menjadi salah satu fokus kajiannya. *Human security* ini menjadi hal penting yang harus diperhatikan untuk upaya penegakan keadilan dan perdamaian. *Human Security* ini dapat dijadikan label yang bermanfaat untuk mendorong perhatian yang lebih besar dari semua pihak bagi upaya penanganan yang serius terhadap ancaman-ancaman keamanan non-militer yang secara signifikan mengancam individu di masa mendatang.³

² *ibid*

³ Amitav Acharya, *Debating Human Security: East Versus the West*.

http://www.propatria.or.id/download/Paper%20Diskusi/human_security_ep.pdf. 11 September

Kekuasaan Hosni Mubarak selama hampir 30 tahun dilandasi dengan kepemimpinannya dengan penindasan politik yang dibenarkan sebagai harga diri sebuah kestabilan negara. Rakyat Mesir hidup di bawah pemerintahan yang bersenjatakan undang-undang darurat, dengan undang-undang darurat itu aparat keamanan dapat bertindak sesuka hatinya, represif, bahkan korupsi serta membiarkan rakyat dicengkram oleh kemiskinan. Para pemimpin militer dan partai politik menikmati impunitas total. Impunitas merupakan pembebasan hukum, impunitas dapat juga berupa pemberian pengampunan dari pejabat pemerintah. Tindakan seperti itu merupakan penghinaan dan tidak disetujui dalam hukum internasional hak asasi manusia.⁴ Para pemimpin militer dan politik tak tersentuh hukum walaupun mereka melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, termasuk penahanan tanpa proses hukum, penyiksaan, dan berbagai bentuk pengingkaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Pembrontakan terhadap pemerintah di Mesir terjadi, rakyat Mesir melakukan demonstrasi di alun-alun Tahrir. Adanya bentrokan antar rakyat mesir dan tentara, demonstrasi itu mengakibatkan banyak korban luka-luka. Mobilisasi rakyat Mesir yang bertujuan untuk menggulingkan kepemimpinan Hosni Mubarak yang dipimpin oleh kelompok ikhwanul muslimin menarik perhatian dunia dan organisasi-organisasi internasional salah satunya PBB. Setelah terjadinya mobilisasi rakyat Mesir yang menghasilkan Hosni Mubarak

⁴ <http://referensi.elsam.or.id/2014/09/impunitas/>

turun dari jabatannya dan terjadilah sebuah revolusi besar-besaran di Mesir.

Revolusi pun terjadi, tidak selang lama dari revolusi tersebut kemudian diadakannya pemilu dan terpilihnya presiden pertama revolusi Muhammad Mursi dari kelompok Fundamentalis Ikhwanul Muslimin (Islam Brotherhood). Terpilihnya Mursi sebagai presiden Mesir membuat ketakutan Amerika sebagai negara yang memiliki hubungan yang sangat baik pada waktu kepemimpinan Hosni Mubarak. Mursi belajar dari sejarah ia tidak mau kekuasaannya nanti ditumbangkan oleh orang-orang yang pro Amerika, maka Mursi melakukan tindakan dengan mencopot petinggi militer yang diwarisi oleh regim Hosni Mubarak yang sangat tedensi ke barat. Ia juga memecat jaksa agung yang menurut dia merupakan kroni dari regim Hosni Mubarak. Hal ini menuai gugatan dari rakyat Mesir, untuk meredamnya Mursi mengeluarkan dektrit dengan upaya untuk menghalangi langkahnya baik secara hukum melalui jalur pengadilan maupun secara politik melalui parlemen.

Disinilah puncak kesempatan para oposan Mursi yang pro barat untuk menumbangkannya, dia dianggap sebagai pemutus kekuasaan pada tangannya sendiri sebuah tindakan yang dilarang dalam demokrasi. Melihat semua itu Amerika memiliki celah untuk menumbangkan regim Mursi yang mengganggu keamanan nasionalnya lewat organisasi Alliance of Youth

Movement yang Amerika dan rakyat Mesir dirikan tahun 2008 dan kelompok pro Hosni Mubarak. Kepemimpinan Mursi yang baru berusia seumur jagung digoncangkan oleh rakyat pro barat dan Hosni Mubarak serta militer yang setiap tahunnya mendapat dana oleh Amerika dengan alasan untuk mengakomodir keperluan militer padahal itu semua untuk para jendral dan pilitisi Mesir yang selalu setia pada Amerika.

Dua tahun tumbangnya Hosni Mubarak oleh gerakan rakyat Mesir di alun-alun Tahrir, terjadi kembali gerakan rakyat yang kedua kalinya kini yang menjadi sasarannya adalah Muhammad Mursi. Inilah kisah ironisnya yang dialami Mursi setelah terpilih menjadi presiden pasca revolusi. Baru saja ia dipuji oleh banyak negara-negara Barat, karena keberhasilannya menjadi penengah konflik bersenjata antara Hamas dan Israel. Disaat Musri mendapat banyak pujian internasional, rakyat Mesir turun kembali untuk berunjuk rasa memprotes dektrit yang dikeluarkan presiden Mursi, dalam dektrit itu Mursi menyatakan semua keputusan dan ketentuan hukum yang dikeluarkan tidak dapat dibatalkan. Disebutkan juga bahwa mahkamah konstitusi tidak berhak membubarkan dewan konstituante, yang bertugas menyusun konstitusi baru.⁵ Secara tegas dinyatakan bahwa keputusan Mursi adalah final dan tidak bisa diganggu gugat ataupun dirubah. Mursi berdalih bahwa dektrit yang ia keluarkan adalah untuk melindungi revolusi yang sudah dilakukan oleh rakyat

⁵Trias Kuncahyono, Jantung Revolusi Mesir, hal.23

Mesir, dapat melindungi kehidupan bangsa, persatuan, dan kesatuan nasional, serta keamanan.⁶

Rakyat Mesir mengorbankan revolusi karena menginginkan keadilan, keamanan, dan stabilitas. Namun yang terjadi adalah kekecewaan dialami lagi oleh rakyat Mesir, Musri tidak membela rakyat ia hanya membela kelompok tertentu, kelompok-kelompok yang mendukungnya. Ekonomi yang tidak stabil angka kriminalitas yang meningkat kini dialami oleh warga Mesir. Pasca revolusi itu banyak perubahan yang terjadi di Mesir hampir setiap hari terjadi demonstrasi dan bahkan banyak jiwa yang melayang. Dekrit dan perencanaan referendum inilah yang memicu kekacauan di Mesir, mereka membentuk dua kubu, kubu pendukung dan penentang. Perlawanan masa pro Mursi belumlah berakhir puncak kesewenang-wenangan militer ditunjukkan dengan menembaki pendukung Mursi yang berjumlah 48 jiwa melayang dan 300 jiwa luka-luka. Amerika berhasil merevitalisasi regim bonekanya dalam sebuah regim militer.

Pasca revolusi Mesir seperti negeri yang tidak memiliki aturan hukum. Rakyat yang sudah tidak mempercayai lagi pemerintah, dan pemerintah dinilai hanya berpihak pada kelompok tertentu. Masalah yang muncul di Mesir pasca revolusi adalah persoalan mayoritas dan minoritas. Peningkaran terhadap semangat revolusi telah hilang, dengan adanya sekat-sekat antar

⁶ Ibid

kelompok dan golongan. Salah satu contohnya pasca revolusi Mesir dibelit kemiskinan, adanya sebuah sekat kelompok antara orang-orang kaya dan orang miskin. Orang-orang kaya membangun sebuah kompleks perumahan eksklusif, sementara orang-orang miskin hidup dengan serba kekurangan.

Banyak dampak negartif yang terjadi pasca revolusi dengan demikian muncullah isu global yaitu keamanan manusia atau *human security*, dampak itu mulai dari pemerintahan, ekonomi, pembangunan, dan hak asasi rakyat Mesir. Isu *human security* muncul karena adanya ketidakamanan terhadap diri dan jiwa manusia, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial dan ekonomi, tidak terpenuhinya basic need, pelanggaran HAM, polusi lingkungan dan bencana alam.

Selama 30 tahun, rakyat Mesir terjebak dan tidak berdaya dalam genggamannya kekuasaan yang membuat mereka merasa kehilangan martabat dan kehormatan. Ketika kesempatan untuk memulihkan rasa itu muncul, kekuasaan kepentingan politik yang berkuasa. Kekuasaan telah menyingkirkan segalanya, akibatnya hilang rasa percaya yang pernah menjadi kekuatan yang mampu meruntuhkan seorang diktator.

Puncak dari gerakan rakyat itu adalah aksi militer menyingkirkan Mursi dan menahannya. Kelompok ikhwanul Muslimin ditangkap dan ditahan. Sejak saat itu rumah demokrasi yang sedang dibangun rakyat dalam masalah. Dengan begitu PBB turun tangan agar dapat menyelesaikan masalah

dampak pasca revolusi Mesir itu. Muncullah isu human security tersebut mendapat perhatian sekjen PBB Ban Ki Moon untuk menanggapi masalah demonstrasi yang dilakukan rakyat Mesir dan tentara Mesir. Ban Ki Moon menyatakan bahwa untuk tidak melakukan kekerasan dan menjamin kebebasan berekspresi dan informasi, pemerintah untuk mendengarkan aspirasi rakyat Mesir karena rakyat Mesir mengalami penekanan dan depresi pasca terjadinya bentrokan tersebut, serta sekjen PBB Ki Moon menyatakan untuk melakukan transisi dengan tertib tidak dengan kekerasan.⁷

PBB merupakan organisasi political, organisasi yang dalam kegiatannya menyangkut masalah-masalah politik dalam hubungan internasional.⁸ Organisasi internasional PBB tidak hanya menangani masalah politik, tetapi masalah konflik perdamaian dan keamanan. Setiap organisasi internasional memiliki peran, peran organisasi internasional sebagai berikut:

- 1) Wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mencegah atau mengurangi intensitas konflik (sesama anggota)
- 2) Sebagai sarana untuk perundingan dan menghasilkan keputusan bersama saling yang saling menguntungkan.
- 3) Bertindak sebagai lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan (kegiatan sosial kemanusiaan, bantuan pelestarian lingkungan hidup, peace keeping operation dan lain-lain).

⁷ <http://www.antaranews.com/berita/245387/sekjen-pbb--rakyat-mesir-inginkan-pembaruan-yang-berani>

⁸ May T. Rudi "Administrasi dan Organisasi Internasional". Penerbit Reflika Aditama, 2009, hal. 9

Human security merupakan perubahan konsep dalam politik internasional.⁹ Perhatian utama keamanan dunia saat ini tidak hanya difokuskan kepada keamanan negara dalam definisi politik (perang) akan tetapi fokus terhadap pemenuhan hak-hak dasar manusia. Asumsi dasarnya adalah jika setiap manusia terpenuhi kebutuhan dasarnya maka keamanan dunia akan terwujud secara otomatis, tentu saja strategi pemenuhan hak-hak dasar tersebut tidak menghilangkan tujuan PBB untuk menjaga stabilitas keamanan dunia.

Human security mengalami pergeseran sejalan dengan kemunculannya di dunia internasional. *United Nations Development Program* (UNDP) dalam Human Development Report 1994 merupakan badan Perserikat Bangsa – Bangsa (PBB) pertama yang memperkenalkan konsep Human Security. Menurut laporan, yang ditulis oleh ekonom Pakistan Mahbub ul Haq, keamanan manusia mengacu pada keselamatan dari ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit, depresi, dan perlindungan dari gangguan mendadak serta menyakitkan dalam pola kehidupan sehari-hari di rumah, pekerjaan, dan komunitas.¹⁰ Badan PBB berpendapat bahwa konflik yang terjadi saat ini lebih banyak terjadi di dalam negara dibanding dengan konflik antar negara.¹¹ Berdasarkan UNDP dalam Human Development Report 1994, untuk

⁹ <http://www.negarahukum.com/hukum/pbb-dan-tantangan-human-security.html>

¹⁰ D.M. Nault, “Human Security in Asia”, “Emerging Issues and Challenges”, Japan: Global Studies Press Osaka, hal.1.

¹¹ Muhibin Raihan Ramadhan, “Human Security”. Jurnal tersedia dalam <http://id.scribd.com/doc/51882487/Human-security>, diunduh pada 20Maret 2014.

keamanan manusia dapat diklasifikasikan menjadi tujuh kategori yaitu, keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan personal atau individu, keamanan kelompok, dan keamanan politik.¹²

Konsep human security lebih bersifat universal yang artinya konsep keamanan ini tidak hanya terbatas pada sebuah negara saja, namun berlaku untuk umum. Bagi seluruh umat manusia di dunia. Mengingat bahwa ancaman bisa datang kepada siapa saja, tanpa memandang negara mana. Sebuah peristiwa pun dapat dikategorikan sebagai *human security* apabila telah sampai mengancam keamanan nasional suatu negara. Untuk itulah mengapa *human security* sangat mendapatkan perhatian di era sekarang ini, bahkan menjadi prioritas utama PBB untuk membrantas segala bentuk ancaman *human security* yang ada.

Strategi PBB dalam menangani Human security perihal pengambilan kebijakan di bidang perdamaian dan keamanan dunia, PBB selalu mengalami persoalan klasik. Krisis pengambilan keputusan di Dewan Keamanan PBB. Kesulitan untuk mengamandemen piagam PBB menjadi persoalan lain yang juga harus dihadapi. Strateginya adalah dengan pengambilan keputusan dengan Majelis Umum PBB terkait situasi yang dapat mengganggu keamanan dan perdamaian. Selain itu, cara lainnya

¹² D.M. Nault, "Human Security in Asia", Japan, Global Studies Press, 2007, hal.220.

dengan memperdayakan organisasi regional.¹³ Cara tersebut lebih ampuh dikarenakan kedekatan secara emosional dengan pihak yang bersengketa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijabarkan di atas, maka mencoba membuat suatu rumusan masalah yaitu, “*Bagaimana Peranan PBB dalam Menangani Human Security Pasca Revolusi di Mesir?*”

D. Kerangka Pemikiran

Dalam menjawab rumusan masalah diatas, penulis menjawab pokok permasalahan dengan menggunakan sebuah konsep. Konsep adalah kata yang melambangkan suatu gagasan.¹⁴ Konsep yang dipakai untuk menjawab rumusan masalah adalah *peace keeping* dan *peace building*. Untuk meneliti konsep yang dipakai, maka perlu dipahami terlebih dahulu definisi dan fungsi organisasi internasional.

Definisi Organisasi Internasional (OI) menurut Daniel S. Cheever dan H. Field Havilland Jr. adalah:¹⁵

Pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara – negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan

¹³ *Ibid*

¹⁴ Mas’oed, Mohtar, Ilmu Hubungan Internasional, Jakarta: LP3ES 1990, hlm.109

¹⁵ Daniel S. Cheever dan H. Field Havilland Jr, *Organizing For Peace International Organization in World Affair*, , New York, 1967, hal.6

dasar, untuk melaksanakan fungsi – fungsi yang memberi timbal balik yang diwujudkan melalui pertemuan – pertemuan serta kegiatan – kegiatan staf secara berkala.

Sedangkan dalam bukunya Teuku May Rudy definisi OI adalah:¹⁶

Organisasi Internasional merupakan suatu pola kerjasama yang melintasi batas – batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan – tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda.

Adapun fungsi OI yaitu:¹⁷

- a. Organisasi Politikal, yaitu OI yang dalam kegiatannya menyangkut masalah – masalah politik dalam hubungan internasional.

¹⁶ Teuku May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009, hal.3

¹⁷ A.A Banyu Perwita dan Yayan M.Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, ROSDA, Bandung, 2005, hal. 95.

- b. Organisasi Administratif, yaitu OI yang sepenuhnya hanya melaksanakan kegiatan teknis secara administrative.
- c. Organisasi Peradilan, yaitu OI yang menyangkut penyelesaian sengkata pada berbagai bidang atau aspek (politik, hukum, sosial, dan budaya) menurut procedural dan melalui proses peradilan (sesuai dengan ketentuan internasional dan perjanjian – perjanjian internasional)

Dalam upaya menciptakan perdamaian dan keamanan internasional, PBB memiliki empat kelompok tindakan, yang saling berkaitan satu sama lainnya dan dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan dari semua anggota PBB agar dapat terwujud. Keempat kelompok tindakan itu adalah *Preventive Diplomacy, Peace Making, Peace Keeping, dan Peace Building*.¹⁸

Peace keeping

Peace keeping adalah instrument penting yang dapat dimanfaatkan oleh komunitas internasional untuk memajukan perdamaian dan keamanan internasional. Tugas dari pengawas perdamaian adalah:

- a. Mempertahankan gencatan senjata untuk pemisahan pasukan, hal ini untuk membina keadaan yang kondusif untuk perundingan.

¹⁸ Boutros Boutros-Ghali, *An Agenda for Peace*, New York: United Nation, 1992, hlm.12

- b. Penempatan pencegahan, hal ini lebih ditekankan untuk dilakukannya sebelum memanasnya konflik, dapat memberikan jaminan adanya kehadiran dan tingkat keterbukaan yang bermanfaat untuk kemajuan politik.
- c. Perlindungan terhadap operasi kemanusiaan, hal ini lebih ditekankan pada perlindungan penduduk sipil dan perlindungan serta dukungan bagi operasi kemanusiaan.
- d. Pelaksanaan penyelesaian yang komprehensif, operasi yang kompleks dan multi dimensional sehingga dapat membantu dalam tugas – tugas yang beragam antara lain, memberikan bantuan kemanusiaan, memantau hak – hak asasi manusia, dan mengkoordinasikan dukungan untuk rekonstruksi perekonomian.

Masalah yang terjadi di Mesir berdampak pada masalah keamanan manusia seperti hak asasi manusia, kemiskinan, angka kejahatan di Mesir meningkat dikarenakan rakyat mesir sudah tidak lagi mematuhi hukum yang berlaku, tidak lagi mempercayai pemerintah. Masalah tersebut menjadi perhatian dunia dan organisasi internasional PBB itu sendiri, sehingga PBB memiliki peran dalam membantu perdamaian dan keamanan yang terjadi pasca revolusi.

Tujuan PBB yang diamanatkan dalam pasal 1 piagam PBB adalah untuk menciptakan perdamaian dan keamanan internasional, untuk mendorong agar sengketa-sengketa diselesaikan secara damai. Dua tujuan tersebut merupakan sebuah reaksi yang terjadi akibat pecahnya perang dunia II. Upaya PBB agar perang dunia baru tidak kembali terjadi adalah kerja keras PBB agar sengketa yang terjadi antar negara dapat diselesaikan sesegera mungkin secara damai.¹⁹

PBB mempunyai berbagai cara yang terlembaga dan termuat didalam piagam PBB. Disamping itu PBB mempunyai cara informal yang lahir dan berkembang dalam pelaksanaan tugas PBB sehari-hari. Cara ini kemudian digunakan dan diterapkan dalam menyelesaikan sengketa yang timbul diantara negara anggota.

Terkait dengan penyelesaian sengketa Internasional dalam kerangka PBB, maka dalam permasalahan *human security*, organisasi internasional PBB akan melakukan sebuah proses *peace keeping*. *Peace keeping* adalah sebuah tindakan untuk mengerahkan kehadiran PBB dalam pemeliharaan perdamaian dengan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Dalam proses tersebut biasanya PBB mengirim kelompok militer, polisi PBB dan juga personil sipil. Meskipun sifatnya militer namun mereka bukan angkatan perang.

¹⁹ J.G. Merrills, *International Disputes Settlement*, Cambridge: Cambridge U.P., 2nd ed., 1995, hlm.179

Peace keeping merupakan konsep yang dimiliki oleh PBB dalam menanggapi tantangan yang diberikan dunia saat ini dengan melakukan teknik – teknik yang ada kemudian dilakukan dan diwujudkan untuk dilakukan pembicaraan antara negara dan juga untuk situasi internal negara yang bertikai akibat perang saudara.²⁰

Peace keeping (menjaga perdamaian) merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh organisasi internasional PBB untuk membantu mencapai tujuan, yaitu menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. Dalam hal ini juga merupakan salah satu pilihan yang dilakukan PBB dalam melakukan penyelesaian masalah *human security* pasca revolusi di Mesir.

Peace Building

Konsep pembangunan perdamaian didefinisikan sebagai aktivitas yang memiliki ruang gerak luas terutama mencakup rekonsiliasi, transformasi sosial dan peningkatan kapasitas para pemilik kepentingan. Aktivitas tersebut berjalan setelah proses *peace making* dan *peace keeping* di wilayah pasca konflik. *Peace building* merupakan proses yang dapat memakan waktu puluhan tahun. Hal ini tidak terlepas dari tiga dimensi yang melingkupi *peace building* yakni structural, relational, dan personal.

²⁰ Canway W. Henderson, *Internasional Relations: Conflict and Cooperations at the turn of 21st Century*, McGraw-Hill Internasional Edition, hlm. 395

Struktural berkaitan dengan bagaimana membangun perdamaian melalui transformasi nilai sekaligus peningkatan kapasitas institusi eksekutif, legislative, dan yudikatif serta mencakup militer dan kepolisian. Dua institusi ini memegang peran penting dalam pengendalian masyarakat pasca konflik yang rentan akan provokasi dan sangat mendambakan penegakan keadilan dan hukum.

Boutros-Ghali mendefinisikan *peace building* sebagai berikut:

Peace building dan *peace keeping* dibutuhkan untuk mencegah konflik dan mempertahankan perdamaian jika kondisi tersebut telah tercapai. Jika sukses, keduanya akan memperkuat kesempatan untuk *peace building* pasca konflik, yang mana dapat mencegah kemunculan kembali kekerasan diantara individu dan negara (1992, 11-12)

Definisi *Peace building* yang ditawarkan oleh Ghali ini kemudian diperjelas oleh hasil kerja PBB atas operasi perdamaianya pada tahun 2000 yang dikenal dengan nama *Brahimi Report* dimana *peace building* diartikan sebagai aktivitas-aktivitas yang diambil pada sisi akhir konflik dalam rangka meletakkan dasar-dasar perdamaian serta penyediaan berbagai perlengkapan untuk membangun sesuatu yang lebih penting daripada hanya suatu kondisi dimana tidak ada perang.²¹

²¹ Muhadi Sugiono dan Rochdi Mohan Nazala, *Peace Building dan Revolusi Konflik dalam Perspektif PBB*.
http://www.academia.edu/1144076/peacebuilding_dan_Resolusi_konflik_dalam_perspektif_PBB

Diluar institusi formal, dimensi relasional di tingkat masyarakat sipil juga perlu dibangun. Misalnya dalam membentuk komisi kebenaran, jaringan ormas, lembaga swadaya masyarakat, dan forum. Kuncinya adalah bagaimana elemen masyarakat dapat mengetahui apa yang terjadi dimasa lalu dan sebagai wadah untuk mengeluarkan pendapat serta partisipasi.

Human security dalam kebijakan dan implementasinya berkaitan dengan konsep *peace building*. Laporan PBB yang berjudul *An Agenda for Peace*, menggariskan bahwa konsep *peace building* disini merupakan proses yang lebih dekat dengan kondisi pasca konflik dimana bertujuan mengidentifikasi dan mendukung struktur-struktur yang akan dapat memperkuat dan mengokohkan perdamaian guna mencegah konflik yang muncul kembali dengan mengidentifikasi akar-akar penyebab konflik.

Dalam pembangunan perdamaian mencakup tindakan – tindakan untuk mencegah munculnya kembali konflik dan mendukung struktur serta praktek – praktek yang memperkuat dan memantapkan perdamaian. Pembangunan perdamaian meliputi:

- a. Pembangunan preventif yang mencakup kegiatan politik, kelembagaan dan pembangunan yang berjangkauan luas dan berjangka panjang.
- b. Pembangunan perdamaian pasca konflik yang meliputi semua usaha untuk mencegah munculnya kembali konflik dan membina konsolidasi perdamaian.

Adapun pembangunan perdamaian terdiri dari lima kegiatan utama, yaitu:

1. Bidang militer dan keamanan yang mencakup peluncutan senjata, demobilisasi, dan penghancuran senjata.
2. Kegiatan politik, yang mencakup pembangunan kelembagaan dan perawatan terhadap anak – anak yang terkena konflik.
3. Tindakan politik, yang mencakup pembangunan kelembagaan dan membina pemerintah yang baik, reformasi konstitusional dan pemilihan.
4. Hak asasi manusia, yang meliputi pemantauan hak – hak asasi manusia, reformasi peradilan dan kepolisian.
5. Langkah – langkah ekonomi dan sosial, yang mencakup rekonstruksi prasarana yang hancur akibat konflik, pengurangan ketidakadilan ekonomi dan sosial serta penciptaan suasana untuk pemerintahan yang baik dan pembangunan ekonomi.

E. Hipotesa

Berdasarkan jawaban yang dilihat dari kerangka pemikiran di atas maka upaya PBB dalam menangani masalah *human security* pasca revolusi:

- PBB menerjunkankan pasukan perdamaian serta mengkoordinasikan bantuan dalam pembangunan di Mesir yang hancur akibat demonstrasi.
- PBB melakukan perdamaian dengan transformasi nilai peningkatan kapasitas institusi dan nilai sosial.

F. Metode Penelitian

Sesuai dengan judul dan bentuk pertanyaan yang digunakan maka metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, sementara teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dimana hampir semua bahan yang digunakan berasal dari buku, jurnal dan sumber lainnya berasal dari Koran, *website*, dan sumber laporan lainnya.

G. Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan

Bagian yang berisi mengenai latar belakang permasalahan serta pokok permasalahan yang akan dibahas, selain itu juga merumuskan beberapa hal pokok antara lain, alasan pemilihan judul, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, dan sistematika penulisan dalam skripsi ini.

Bab II. Runtuhnya Rezim Hosni Mubarak

Bab ini memaparkan dengan jelas masa kepemimpinan Hosni Mubarak sampai terjadinya gejolak yang dilakukan rakyat Mesir. Dalam bab ini juga akan dijelaskan tentang kepemimpinan presiden pertama revolusi dan masa kepemimpinannya. Penulis akan membagi menjadi beberapa sub bab seperti:

- a. Sejarah kepemimpinan Hosni Mubarak
 - 1. kebijakan politik Hosni Mubarak
 - 2. kebijakan ekonomi Hosni Mubarak
 - 3. penurunan Hosni Mubarak
- b. Revolusi Mesi
- c. Pasca Revolusi Mesir
- d. Pembrontakan Terhadap Mursi

Bab III. Peran PBB dan Dinamika Permasalahan Human Security

Bab ini akan menjelaskan lebih banyak tentang organisasi internasional PBB. Peranan PBB, fungsi dan wewenang PBB sebagai organisasi internasional. Selain itu di bab ini penulis juga menjelaskan masalah human security yang terjadi di Mesir.

- a. Fungsi dan Wewenang PBB
- b. Peran PBB dalam Konflik Internasional
- c. Kondisi Human Security Pasca Revolusi

- d. Peran PBB dalam menangani Human Security

Bab IV. Peran PBB dalam menangani Human Security Pasca Revolusi

Bab IV memaparkan peran PBB sebagai organisasi internasional dalam menangani human security dan di bab ini juga menjelaskan tentang langkah dari peace keeping dan peace building.

- a. Operasi Penjaga kemanan
- b. Operasi Pembangunan

Bab V. Kesimpulan

Bagian ini menyimpulkan hasil penelitian yang diperoleh yang dijadikan jawaban yang menjadi pokok permasalahan.